



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat/pengesahan nikah :

PEMOHON I., NIK. -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 07 Februari 1964, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II., NIK. -, tempat tanggal lahir Sumatra Barat, 18 Agustus 1964, umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Bkl. tanggal 04 April 2024 telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 20 Maret 1995 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Jl. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan surat keterangan Nomor B-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/Kua.13.20.04/PW.01/04/2024 tanggal 03 April 2024 dan diad nikahkan oleh Penghulu;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II, Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Saksi Nikah, usia 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- b. Saksi Nikah, Usia 57, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Maskawinnya berupa Uang sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu ;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I, berstatus Jejaka, dalam usia 31 tahun; Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Ayah Pemohon I..... Telah Meninggal Dunia;

Ibu : Ibu Pemohon I..... Telah Meninggal Dunia;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 Tahun. Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Ayah Pemohon II..... Telah Meninggal Dunia;

Istri : Ibu Pemohon II..... Telah Meninggal Dunia;

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, selama kurang lebih 29 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (Empat) anak ;

- Anak, Laki- Laki, Lahir di Irian Jaya, Tanggal 30 Desember 1996;
- Anak, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 18 Februari 2000;
- Anak, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 18 Agustus 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 31 Desember 2003;
- 7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- 8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah Para Pemohon, mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan persyaratan administrasi lainnya Para Pemohon;
- 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Jl. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama *Pemohon I/Pemohon I*, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-09-2012, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon II/Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 05-09-2012, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga *Pemohon I Mochtar/Pemohon I*, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 21-03-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :B-198/Kua.13.20.04/Pw.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 April 2024, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : **Saksi Nikah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan - Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai sepupu Pemohon I;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pembuatan Surat Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Paman Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang saat itu juga dihadiri undangan;
4. Bahwa saksi tahu saat itu pernikahannya juga dihadiri oleh undangan dan akadnya dinyatakan sah;
5. Bahwa saksi tahu ketika menikah mereka Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan dan sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada yang keberatan;

Saksi II : **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan - Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Surat Nikah Para Pemohon;
3. Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Paman Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, yang saat itu juga dihadiri undangan;
4. Bahwa saksi juga tahu saat itu pernikahannya juga dihadiri oleh undangan, dan oleh saksi-saksi serta yang hadir dinyatakan sah;
5. Bahwa saksi tahu ketika menikah mereka Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan dan sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Menasehati

Menimbang, bahwa dalam Upaya memberikan pemahaman kepada Para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan masukan-masukan sebagai Upaya menasehati dengan memberikan pengertian-pengertian berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban Para Pemohon dalam menjalani ikatan perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo adalah bahwa pada tanggal 20 Maret 1995 di Jl. - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di rumah Pemohon II dilaksanakan akad nikah yang diakadnikahkan oleh H. Mahrus, sedangkan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, Saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah, Agama Islam, dan Saksi Nikah, Agama Islam, dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah digunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon dipergunakan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah diumumkan tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Itsbat Nikah perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga dengan demikian para Pemohon dan mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 20 Maret 1995 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jl. - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diakadnikahkan oleh Penghulu dengan wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Paman Pemohon II Saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah, Agama Islam, dan Saksi Nikah, Agama Islam, dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah isteri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 1995 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 4 anak;
3. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap sah dan tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat autentik berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) adalah suami isteri sah yang pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan -, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Para Pemohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah masuk dalam satu susunan keluarga, dengan demikian Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga/sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 1995 dan tidak dicatatkan, selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak, pernikahan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 tersebut tetap sah, tidak pernah bercerai atau murtad dan tidak pernah ada yang keberatan dengan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 1995 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 4 anak;
4. bahwa pernikahan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Rumah orang tua Pemohon II di Jl. - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan tersebut tetap sah dan tidak pernah bercerai atau murtad;

Pertimbangan Petition Pengesahan Nikah



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Pemohon adalah sebagai suami isteri, pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dan selama dalam pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap Islam/tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Rumah orang tua Pemohon II di Jl. - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan Para Pemohon telah beritikad baik untuk menjadikan agar pernikahannya tersebut di samping sah telah dilakukan menurut agama/Islam juga sah menurut negara, dengan demikian oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara syari'at Islam pada tanggal 20 Maret 1995 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Paman Pemohon II dan disaksikan pula oleh saksi nikah bernama Saksi Nikah, Agama Islam, dan Saksi Nikah, Agama Islam, adalah telah terbukti dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan serta tidak melanggar ketentuan yang diatur pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (3) huruf e dan telah memenuhi ketentuan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan (2.a), pasal 24, 25, dan 30, serta tidak pula melanggar Pasal 39, 40, 41, 42, 43 ayat (1) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan Instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (Pemohon II) bernama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Rumah orang tua Pemohon II di Jl. - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 22 April 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Farihin,SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 420.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 690.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)